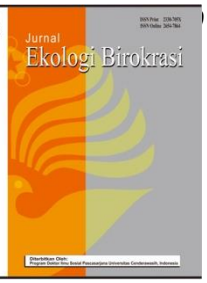
http://ejournal.uncen.id/index.php/JEB
Jurnal Ekologi Birokrasi
Volume 12 Nomor 3 2024
ISSN Print 2338-075X
ISSN Online 2654-7864



Implementasi Relokasi Pasar Youtefa di Kota Jayapura

Robert Awi*, Akbar Silo, Hans Z. Kaiwai

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia
Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Indonesia
E-mail Korespondensi Penulis: robertlnawi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Self Legitimacy, Organizational Culture, Endogenous Factors, Exogenous Factors, Police Organization

How to Cite:
Awi, R., Silo, A. (2024). Implementasi Relokasi Pasar Youtefa di Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(3): 210-xxx.

DOI:
10.31957/jeb.v12i3.xxxx

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and describe the implementation of Youtefa market relocation in Jayapura City and to find out the obstacles in the implementation of Youtefa traditional market relocation in Jayapura City. This research was conducted at the Office of Industry Trade Cooperatives and Small and Medium Enterprises. This type of research is qualitative which is descriptive. Primary data is collected directly from the field. Primary data sources are data sources that can directly provide information about anything related to the problem under study. Secondary data archives, papers, scientific journals, literature, laws and regulations, documents from related parties, and books related to the research problems of data structuring are analyzed using descriptive methods. The author uses triangulation to verify the truth of the collected data. The results of the research on the implementation of Youtefa market relocation policy show that in communication, the efforts made by the government to implement this policy are seminars, directives from the mayor of Jayapura, internal staff meetings, staff coordination. The number of policy implementers involved is sufficient. The employees who also act as implementers have a good attitude towards the policy. There is no SOP as guidelines and implementation instructions.

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

ISSN Print 2338-705X, ISSN Online 2654-7864

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Legitimasi Diri, Budaya Organisasi, Faktor Endogen, Faktor Eksogen, Organisasi Kepolisian

Cara Mengutip:
Supraptono, Muhdiarta, U. (2024). Analisis Legitimasi Diri dalam Budaya Organisasi Kepolisian : Studi Literatur.

DOI:
10.31957/jeb.v12i3.xxxx

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi relokasi Pasar Youtefa Kota Jayapura serta mencari tahu hambatan-hambatan dalam pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional Youtefa Kota Jayapura. Penelitian ini dilaksanakan di dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil menengah. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder arsip, makalah, majalah ilmiah, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dari pihak terkait, dan buku-buku yangberkaitan dengan masalah penelitian mengenai penataan data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis menggunakan trianggulasi untuk menguji kebenaran data yang terkumpul. Hasil penelitian implementasi kebijakan relokasi pasar Youtefa menunjukkan bahwa pada komunikasi, upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyampaian kebijakan ini adalah Seminar, Arahan-arahan dari Walikota Jayapura, Rapat internal pegawai, Koordinasi pegawai. Jumlah pelaksana kebijakan yang terlibat sudah mencukupi. Para pegawai yang juga bertindak sebagai pelaksana sudah bersikap baik terhadap kebijakan tersebut. SOP yang disertakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan belum ada.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Van Mater dan Van Horn (1975 dalam Budi Winarno 2007:144), proses implementasi sebagai "those actions by public or private individuals (orgroups) that are directed at the achievement of objectives set forthe inprior decisions" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat / kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Implementasi kebijakan dipandang dalam arti yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang- undang, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan- tujuan kebijakan atau program-program.

Permendag No. 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat menyiratkan pentingnya revitalisasi pasar untuk emmenuhi kebutuhan pedagang pada lokasi yang strategis. Untuk tujuan tersebut, pengelolaan maupun program relokasi pasar berasal dari dana alokasi khusus. Pasar rakyat masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya kota Jayapura. Pasar tradisional atau lebih dikenal dengan sebutan pasar rakyat, saat ini tidak tertata dengan rapi akibat banyak pedagang yang berjualan di

luar pasar, jalan raya sehingga menganggu para pengguna jalan roda empat maupun roda dua serta kurangnya kenyamanan dan keamanan.

Kondisi ini semakin menjadi persoalan karena para mama penjual komoditas hasil pertanian dan perkebunan berjualan di Pasar Youtefa tidak memiliki tempat yang memadai, sehingga terkena terik matahari, kehujanan, dan kerap terkena banjir. Sehingga pemerintah kota Jayapura berencana untuk merelokasi pasar Youtefa ke pasar baru di daerah Otonom Jayapura. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah.

Upaya dipindahkannya pedagang yang berada di pasar lama ke pasar yang baru menemui kebuntuan. Pasalnya, pemindahan pasar baru otonom dianggap belum memadai dan letaknya tidak strategis seperti di pasar lama Youtefa. secara geografis, pasar lama Youtefa rentan terkena banjir. Hal ini berdampak pada aspek kesehatan, dan menimbulkan berbagai persoalan lainnya. Akan tetapi di sisi lain, pasar lama Youtefa dapat menampung semua pedagang. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Disperindag) Kota Jayapura membuat kebijakan tentang relokasi pedagang pasar rakyat Youtefa ke pasar rakyat berbasis modern yang telah di bangun Pemerintah Kota Jayapura.

Relokasi Pasar Youtefa di Kota Jayapura menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan efisiensi perdagangan di kawasan tersebut. Saat ini, Pasar Youtefa mengalami berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, sanitasi yang buruk, serta kondisi bangunan yang sudah tidak memadai untuk menampung jumlah pedagang dan pengunjung yang terus meningkat. Dengan adanya relokasi, pemerintah berupaya memindahkan pasar ke tempat yang lebih strategis dengan fasilitas yang lebih baik, sehingga tidak hanya memperbaiki kenyamanan pedagang dan pembeli, tetapi juga mengurangi tekanan pada lingkungan sekitar pasar yang padat dan kumuh.

Pentingnya relokasi Pasar Youtefa juga didasari oleh kebutuhan akan pengelolaan tata ruang kota yang lebih baik. Lokasi pasar saat ini menyebabkan kemacetan di wilayah Abepura, terutama karena banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan di sekitar pasar. Selain itu, kondisi pasar yang sudah tua memerlukan renovasi besar, yang sulit dilakukan tanpa mengganggu aktivitas perdagangan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan memindahkan pasar ke tempat yang lebih modern dan terencana, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas, memperluas ruang dagang, serta menyediakan fasilitas umum seperti parkir yang memadai dan sistem sanitasi yang lebih baik

Relokasi juga penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan fasilitas yang lebih baik, para pedagang diharapkan bisa menjalankan usahanya dengan lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Lokasi baru yang lebih bersih dan nyaman juga akan menarik lebih banyak pengunjung, baik warga lokal maupun turis. Relokasi ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan pasar tradisional sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kota yang lebih luas, serta sebagai upaya mendukung pertumbuhan sektor perdagangan secara berkelanjutan di Jayapura

Pasar tradisional juga harus dilestarikan karena dengan banyaknya pasar modern seperti minimarket akan mengancam keberadaan pasar rakyat. Pasar tradisional seharusnya tidak kalah saing oleh pasar modern yang ada saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang implementasi relokasi Pasar Tradisional Youtefa Kota Jayapura Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional Youtefa Kota Jayapura.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data Primer diperoleh secara langsung melalui wawancara. Data Sekunder diperoleh melalui arsip, makalah, majalah ilmiah, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dari pihak terkait, dan buku-buku yangberkaitan dengan masalah penelitian mengenai penataan pasar di pasar Youtefa. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, Dokumentasi, dan

Obsevasi lapangan. Metode Analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Youtefa Kota Jayapura, berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam tabel yang dilengkapi dengan menguraaikan serta mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah serta memberikan interpretasi hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saranya. Validitas data menggunakan triangulasi untuk menguji kebenaran data yang terkumpul. Trianggulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan ata sebagai pembanding data (Moleong, 2002:178).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Relokasi Pasar Youtefa

asar Youtefa, yang terletak di Distrik Abepura, Kota Jayapura, merupakan pusat perdagangan tradisional yang penting bagi warga setempat, namun menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur. Kondisi jalan menuju pasar, terutama saat musim hujan, sering kali tergenang air, berlumpur, dan penuh lubang, yang menghambat akses pembeli dan pedagang. Di musim panas, jalanan yang berdebu turut menurunkan minat pembeli, menyebabkan penurunan pendapatan bagi para pedagang. Meskipun sudah ada pembangunan fisik di dalam pasar, seperti fasilitas kios yang lebih modern, masalah akses dan kenyamanan tetap menjadi keluhan utama pedagang dan pengunjung (Cenderawasih Pos, 2024).

Selain infrastruktur, pasar ini juga sempat dilanda kebakaran besar pada awal tahun 2023 yang menghancurkan lebih dari 170 lapak, mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Kebakaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memperparah kondisi pasar yang sudah kurang optimal dalam hal pelayanan dan fasilitas. Kebakaran ini pun menambah beban bagi para pedagang yang sudah berjuang dengan kondisi pasar yang kurang memadai (JPNN, 2023).

Meski demikian, Pasar Youtefa tetap menjadi pusat ekonomi vital di Jayapura, dan pemerintah kota perlu segera mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki fasilitas dasar seperti jalan dan sistem penanggulangan bencana. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan pedagang serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Usaha perbaikan yang konsisten, seperti perencanaan pembangunan jalan sepanjang 400 meter di dalam kompleks pasar, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut dalam jangka panjang (Cenderawasih Pos, 2024).

Awal munculnya kebijakan relokasi pasar youtefa karena berbagai faktor. Terutama faktor kebersihan tempat dan ketiadaan tempat berjualan untuk pedagang kecil seperti penjual sayur dan daging. Sehingga apabila hujan, hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi pasar youtefa karena rawan terkena banjir yang justru berpengaruh terhadap kesehatan bukan hanya penjual, tetapi juga konsumen.

Berkaitan dengan penyampaian kebijakan ini, dari hasil wawancara dengan para informan dapat dikatakan bahwa penyampaian kebijakan sudah berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyampaian kebijakan ini antara lain melalui:

1. Seminar yang diadakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Jayapura yang melibatkan para pedagang dan instansi-instansi terkait dalam pembangunan pasar youtefa baru;
2. Arahan-arahan dari Walikota Jayapura;

3. Rapat internal pegawai;
4. Koordinasi pegawai;

Dalam pentransmisian kebijakan pembentukan dan kriteria OPD di Disperindagkop dan UKM Jayapura tidak ditemukan pertentangan yang muncul dari pegawai. Kemudian mengenai sistem birokrasi, dapat dikatakan bahwa dalam mentransmisikan kebijakan ini sistem birokrasi di Disperindagkop dan UKM bukan merupakan kendala yang dapat menghambat proses pentransmisian.

Demikian pula dengan tingkat penangkapan komunikasi-komunikasi kebijakan oleh pelaksana. Pada umumnya kemampuan para pelaksana dalam menangkap makna dari kebijakan ini sudah sangat baik, sehingga para pelaksana dapat menjalankan semua program yang direncanakan yang ada dengan baik pula. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar youtefa, pesan dari informasi kebijakan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada para pelaksana dapat segera dilaksanakan apabila ada instruksi.

3.2. Implementasi kebijakan Relokasi Pasar Youtefa dengan Teori Edwards III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III menunjukan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

Pertama, komunikasi. Komunikasi, yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengamplikasikan program dan kebijakan dalam ranah sesungguhnya.

Kebijakan pemerintah mengenai implementasi relokasi pasar Youtefa baru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan menyiratkan bahwa pasar rakyat dapat direvitalisasi dengan memenuhi prasyarat tempat yang strategis. Sedangkan pada Permendag No. 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat menyiratkan pentingnya revitalisasi pasar untuk emmenuhi kebutuhan pedagang pada lokasi yang strategis. Pada kenyataannya, kedua peraturan tersebut belum memiliki kekuatan tanpa adanya instruksi maupun peraturan walikota.

Kedua, sumber daya. Sumber daya, yaitu menunjukan sikap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecakupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecakupan model investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Implementasi kebijakan pembentukan dan kriteria OPD di Disperindagkop dan UKM tidak akan berjalan tanpa adanya staff yang terlibat. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan relokasi pasar youtefa, jumlah pelaksana kebijakan yang terlibat sudah mencukupi. Para personil yang terlibat adalah keseluruhan pegawai yang berada di lingkungan Disperindagkop dan UKM. Kemudian, berkaitan dengan kondisi kecakapan dan kompetensi para personil tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing personil sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap aspek organisasi.

Ketiga, Dsiposisi. Disposisi, yaitu menunjukan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan akan senantiasa bertahan diantara hubungan yang ditemui dalam program/ kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akna menurunkan risistensi dan masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap impolementor dan program/ kebijakan. Para pegawai yang juga bertindak sebagai pelaksana sudah bersikap baik terhadap kebijakan tersebut.

Keempat, Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi, menunjukan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian “ yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

SOP adalah ukuran-ukuran dasar yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan sebagai upaya penyeragaman tindakan para pelaksana. Untuk pelaksanaan kebijakan ini, SOP yang disertakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan belum ada sejauh ini karena situasi di tengah pandemi membuat kebijakan relokasi pasar youtefa tertunda. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, tindakan para pelaksana dapat dikatakan sudah seragam, jelas dan sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di atas. Dalam Implementasi relokasi pasar youtefa baru, semua kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya diserahkan kepada pihak Disperindagkop dan UKM.

3.3. Faktor Penghambat Implementasi Relokasi Pasar Youtefa

Pertama, Pandemi Covid-19. faktor lingkungan, dimana pada tahun 2020 bencana Non-Alam Covid-19 tengah mewabah ke hampir seluruh dunia. Bencana ini berdampak langsung pada institusi pemerintahan dalam negeri. Sehingga, implementasi relokasi pasar Youtefa mengalami penundaan sampai waktu yang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi, penundaan tersebut terbatas pada aspek-aspek tertentu.

Pembangunan infrastruktru pasar Youtefa yang baru tetap menjadi prioritas Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Disperindagkop Jayapura.

Kedua, Penolakan Relokasi dari Sebagian Pedagang

Sebagian pedagang pasar, terutama yang telah memiliki kios permanen menolak kebijakan relokasi karena alasan bermacam-macam. Ada pedagang yang menolak karena lokasi yang baru luas lahan sempit, karena merasa memiliki pelanggan pada pasar youtefa yang lama, dan lain-lain.

Ketiga, Kondisi Sarana dan Prasarana. Hambatan lainnya adalah fasilitas dan kondisi Pasar Youtefa lama tidak memungkinkan karena aspek kesehatan, dan kerawanan terhadap bencana banjir. Pada situasi tertentu dengan hujan dalam waktu lama, dapat dipastikan bahwa akan terjadi banjir. Dengan terjadinya banjir, genangan air juga menuju pada terminal pada pasar Youtefa lama. Terminal lama dengan demikian dianggap tidak memadai dan tampak sunyi. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya dilakukan relokasi ke pasar Youtefa baru, sehingga aspek kesehatan dan kenyamanan lebih memadai.

4. Kesimpulan

Proses Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan relokasi pasar Youtefa didapatkan hasil dengan rincian; aspek komunikasi, berkaitan dengan penyampaian kebijakan ini, dari hasil wawancara dengan para informan dapat dikatakan bahwa penyampaian kebijakan sudah berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyampaian kebijakan ini antara lain melalui Seminar, Arahan-arahan dari Walikota Jayapura, Rapat internal pegawai, dan Koordinasi pegawai. Kemudian, sumber daya, Disperindagkop dan UKM lebih memaksimalkan pemanfaatan semua sumberdaya pendukung yang dimiliki dan koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Dinas Kebersihan. Disposisi, Para pegawai yang juga bertindak sebagai pelaksana sudah bersikap baik terhadap kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi, SOP adalah ukuran-ukuran dasar yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan sebagai upaya penyeragaman tindakan para pelaksana. Untuk pelaksanaan kebijakan ini, SOP yang disertakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan belum ada sejauh ini karena situasi di tengah pandemi membuat kebijakan relokasi pasar youtefa tertunda.

Pedagang diharapkan dapat mengikuti dan menerima kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura dengan baik, sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Karena kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan, dalam hal kenyamanan, keamanan, dan ketentraman bersama. Sedangkan Pemerintah dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM hendaknya kebijakan yang dilakukan ini merupakan kebijakan yang terakhir, karena dengan relokasi pasar akan membuat para pedagang mengalami kerugian. Dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas inmplementor dalam pengelolaan pasar tradisional.

Daftar Pustaka

Barker, R. (2001). *Legitimating identities: The self-presentations of rulers and subjects*. Cambridge: Cambridge University Press.

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Cenderawasih Pos. (2024, 14 Maret). *Jalan Pasar Youtefa Rusak Parah, Jangan Ada Kesan Pembiaran*. Diakses dari https://cenderawasihpos.jawapos.com pada tanggal 28 Mei 2024.

Dwiyanto, I. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Fuad, M., Christin, H., Nurlela, Sugiarto, & Paulus, Y. E. F. (2006). *Pengantar bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indiahono, D. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

JPNN. (2023, 8 Januari). Kebakaran Pasar Youtefa, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 12 Miliar. Diakses dari https://www.jpnn.com pada tanggal 29 mei 2024.

Kusumanegara, S. (2010). *Model aktor dalam proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Masyhuri, M. Z. (2008). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi: Teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, R. D. (2006). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang: Model-model perumusan, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia* (Cetakan kedua). Yogyakarta: Gava Media.

Purwanto, M. (2007). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Santosa, P. (2008). *Administrasi publik: Teori dan aplikasi good governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Silitonga, E. (2018). Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Kota Medan. *Jurnal*.

Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan publik*. Makassar: CV Sah Media.

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik: Kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sutopo, H. B. (2002). *Pengantar penelitian kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Teguh, M. (2013). Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (Studi kasus di kawasan Cidadas Kota Bandung). *Jurnal*.

Waluyo, H., & Hastuti, D. (2011). *Kamus terbaru ekonomi dan bisnis*. Surabaya: Reality Publisher.

Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yonesius, M., Geru, H. A., & Liando, D. M. (2014). Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Manado. *Jurnal*.